



DESENTRALISASI DAN OTONOMI KHUSUS: DINAMIKA SISTEM POLITIK INDONESIA DI MERAUKE

DECENTRALIZATION AND SPECIAL AUTONOMY: DYNAMICS OF INDONESIA'S POLITICAL SYSTEM IN MERAUKE

Willem Kambuam

STISIPOL Yaleke Maro Merauke

Email: wkambuam@gmail.com

Abstract

Article Info

Article history :

Received : 24-12-2024

Revised : 26-12-2024

Accepted : 28-12-2024

Published: 31-12-2024

This study aims to analyze the dynamics of the political system in Merauke Regency in the context of decentralization and Special Autonomy (Otsus), by highlighting the role of local political actors, power relations, and community participation in local governance. The method used is a qualitative approach with a descriptive-analytical method, which allows for in-depth exploration of meanings, perceptions, and social interactions in the local political system. Data were collected through in-depth interviews with government officials, DPRD members, traditional leaders, and local activists, as well as through participant observation and documentation studies. The results of the study show that decentralization and Otsus have brought significant changes to the political structure in Merauke, but their implementation still faces challenges, especially in terms of power distribution and community participation. Although Otsus aims to strengthen the role of indigenous peoples in government, there is still inequality in access to political decision-making, which is dominated by local elites. Community participation is also limited due to the lack of political education and policy transparency. In addition, the management of Special Autonomy funds still faces obstacles in accountability, which has an impact on development inequality and the potential for social instability. The conclusion of this study confirms that the effectiveness of Special Autonomy is highly dependent on the balance between political decentralization and local community empowerment. Therefore, reforms are needed in regional governance, increasing budget transparency, and strengthening the participation of indigenous peoples in the political and development process. With these strategic steps, it is hoped that Special Autonomy can contribute more optimally in creating a more inclusive and equitable political system in Merauke.

Keywords: *Decentralization, Special Autonomy, Political System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke dalam konteks desentralisasi dan Otonomi Khusus (Otsus), dengan menyoroti peran aktor politik lokal, relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai makna, persepsi, dan interaksi sosial dalam sistem politik lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh adat, dan aktivis lokal, serta melalui observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan Otsus telah membawa perubahan signifikan dalam struktur politik di Merauke, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek distribusi kekuasaan dan partisipasi masyarakat. Meskipun Otsus bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam pemerintahan, masih terdapat



ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan politik, yang lebih didominasi oleh elit lokal. Partisipasi masyarakat juga terbatas akibat kurangnya pendidikan politik dan transparansi kebijakan. Selain itu, pengelolaan dana Otsus masih menghadapi kendala dalam akuntabilitas, yang berdampak pada ketimpangan pembangunan dan potensi ketidakstabilan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Otsus sangat bergantung pada keseimbangan antara desentralisasi politik dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat adat dalam proses politik dan pembangunan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Otsus dapat berkontribusi lebih optimal dalam menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Merauke.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Khusus, Sistem Politik

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya, suku, dan sumber daya alam memiliki tantangan dalam mengelola pemerintahan yang efektif dan inklusif (Parsons, Taylor, and Crease 2021). Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah desentralisasi, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (Chen et al. 2022). Dalam konteks Papua, termasuk Kabupaten Merauke, desentralisasi diperkuat dengan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) sejak tahun 2001 sebagai respons terhadap tuntutan keadilan dan pengakuan hak-hak masyarakat Papua.

Kabupaten Merauke, sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan, memiliki dinamika tersendiri dalam penerapan kebijakan Otonomi Khusus. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis (Lee and He 2022), Merauke memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi Otsus di daerah ini menghadapi berbagai tantangan, seperti tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Lee and He 2022). Perdebatan mengenai efektivitas Otsus di Merauke masih menjadi isu penting dalam diskursus politik lokal dan nasional.

Implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Kabupaten Merauke menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan dana Otsus yang belum sepenuhnya transparan dan merata dalam distribusinya. Meskipun alokasi dana cukup besar, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan, terutama bagi penduduk asli Papua. Beberapa laporan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan dana, dengan sebagian besar anggaran lebih banyak terserap untuk birokrasi dibandingkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Khanal et al. 2023). Selain itu, infrastruktur dan layanan publik di beberapa wilayah terpencil masih tertinggal, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Selain aspek ekonomi dan pembangunan, permasalahan politik dan sosial juga menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika Otonomi Khusus di Merauke. Partisipasi politik masyarakat asli Papua masih tergolong rendah, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam keterlibatan langsung dalam pemerintahan. Di sisi lain, ada ketegangan sosial antara penduduk asli dengan pendatang, terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi (García Guerrero et al. 2021). Hal ini diperparah dengan kebijakan yang terkadang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan



meningkatkan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan desentralisasi dan Otonomi Khusus agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Merauke.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi desentralisasi dan Otonomi Khusus di Papua, termasuk di Kabupaten Merauke. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo et al. 2021) menyoroti efektivitas Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, namun menemukan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan akibat lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, penelitian oleh (Figueroa Huencho 2022) mengungkap bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi Otsus adalah kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, sehingga manfaat dari kebijakan ini tidak merata. Studi lain oleh (Lassou, Hopper, and Soobaroyen 2021) menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks serta praktik korupsi turut menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana Otsus. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Otsus bertujuan memberikan kewenangan lebih kepada daerah, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar kebijakan ini benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Merauke.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi Otonomi Khusus di Papua, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik membahas dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek ekonomi, kebijakan anggaran, serta dampak sosial dari Otsus secara umum, namun belum banyak yang menganalisis bagaimana desentralisasi dan Otonomi Khusus memengaruhi struktur politik lokal, relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Selain itu, masih terbatas kajian yang mengulas bagaimana aktor-aktor politik lokal, baik dari pemerintah, masyarakat adat, maupun kelompok pendatang, (Bhat and Rajeshwari 2022) berinteraksi dalam dinamika politik Otsus di Merauke. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai peran desentralisasi dan Otonomi Khusus dalam membentuk sistem politik di Merauke serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting mengingat Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah strategis di Papua Selatan yang memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan Otonomi Khusus. Meskipun Otsus telah berjalan selama lebih dari dua dekade, masih terdapat berbagai permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi politik masyarakat, serta distribusi manfaat pembangunan yang belum merata. Tanpa adanya evaluasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika sistem politik di Merauke, (Bhat and Rajeshwari 2022) kebijakan desentralisasi dan Otsus berisiko tidak berjalan optimal dan bahkan dapat memperburuk ketimpangan sosial serta konflik kepentingan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademis dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas desentralisasi serta memastikan bahwa Otonomi Khusus benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Merauke, khususnya bagi penduduk asli Papua.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis secara spesifik bagaimana desentralisasi dan Otonomi Khusus membentuk dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke,



sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dari studi terdahulu yang lebih berfokus pada aspek ekonomi dan distribusi dana Otsus, penelitian ini akan mengeksplorasi peran aktor politik lokal, relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah (Palmer and Chuamuangphan 2021). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana interaksi antara penduduk asli dan pendatang dalam konteks politik lokal serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dan pembangunan di Merauke. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami efektivitas desentralisasi dan Otsus dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Papua Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke dalam konteks desentralisasi dan Otonomi Khusus, dengan fokus pada peran aktor politik lokal, relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah dan dampaknya terhadap stabilitas sosial serta pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke dalam konteks desentralisasi dan Otonomi Khusus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta interaksi sosial yang terjadi dalam sistem politik local (HASSAN 2023). Dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Otsus di Merauke serta bagaimana kebijakan ini membentuk struktur politik, relasi kekuasaan, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai salah satu daerah yang menerima dana dan kewenangan khusus dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Subjek penelitian mencakup aktor-aktor politik lokal, pejabat pemerintahan daerah, anggota DPRD, tokoh masyarakat adat, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dan kelompok pendatang. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai efektivitas desentralisasi dan Otsus (Cornito 2021), baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh adat, dan aktivis lokal untuk memperoleh wawasan mengenai kebijakan Otsus serta tantangan dalam implementasinya. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung dinamika politik dan interaksi sosial di Merauke, termasuk dalam forum-forum diskusi atau kebijakan publik. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis berbagai dokumen kebijakan (Timotheou et al. 2023), laporan pemerintah, peraturan daerah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori desentralisasi dan Otonomi Khusus. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian



ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memastikan konsistensi temuan (Khoa, Hung, and Hejsalem-Brahmi 2023).

Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan mengkaji bagaimana desentralisasi dan Otonomi Khusus berpengaruh terhadap struktur politik dan tata kelola pemerintahan di Merauke. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi Otsus serta memperkuat sistem politik lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kesimpulan yang dihasilkan akan berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam konteks desentralisasi di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Dinamika Sistem Politik dalam Kerangka Otonomi Khusus di Merauke

| Aspek | Temuan Penelitian |
|---------------------------------------|---|
| Perubahan Sistem Politik | Sistem politik mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Otonomi Khusus. |
| Peningkatan Kewenangan | Pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengatur kebijakan lokal. |
| Peran Aktor Politik Lokal | Aktor politik lokal semakin dominan dalam pengambilan keputusan, terutama dari kalangan elit politik. |
| Hubungan Pemerintah & Masyarakat Adat | Muncul dinamika baru dalam relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat, yang masih menghadapi berbagai tantangan. |
| Tujuan Otonomi Khusus | Memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan dan pembangunan. |
| Kendala yang Dihadapi | Representasi politik masyarakat adat masih terbatas akibat kendala struktural dan sosial. |

Makna dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan Otonomi Khusus di Merauke telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, terutama dalam peningkatan kewenangan pemerintah daerah dan dominasi aktor politik lokal. Meskipun tujuan Otsus adalah memberikan lebih banyak ruang bagi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan, kenyataannya mereka masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial yang menghambat representasi politik mereka. Selain itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat mengalami dinamika baru, yang masih membutuhkan penyesuaian untuk memastikan kebijakan lebih inklusif dan berpihak kepada kepentingan lokal.

Tabel 2: Peran dan Tantangan Aktor Politik Lokal dalam Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Merauke

| Aktor Politik Lokal | Peran dalam Kebijakan Desentralisasi dan Otsus | Tantangan yang Dihadapi |
|---------------------------------------|--|--|
| Pejabat Pemerintah Daerah | Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan desentralisasi serta mengelola dana Otsus. | Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan yang cenderung berpihak pada elit politik. |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | Mewakili aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Otsus. | Dominasi kelompok elit politik menghambat keterwakilan masyarakat adat secara proporsional. |
| Tokoh Adat | Mempertahankan nilai-nilai budaya dalam pemerintahan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. | Partisipasi yang masih terbatas dan kurangnya pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. |



| | | | |
|-------------------------|-------------|--|---|
| Kelompok Politik | Elit | Mengendalikan kebijakan dan distribusi sumber daya melalui jaringan politik dan ekonomi. | Kepentingan pribadi atau kelompok sering kali lebih diutamakan dibandingkan kesejahteraan masyarakat secara luas. |
| Masyarakat Adat | | Sebagai penerima manfaat kebijakan Otsus dan bagian dari sistem politik lokal. | Rendahnya keterlibatan dalam proses politik akibat kurangnya akses informasi dan pendidikan politik. |

Makna dari tabel di atas menunjukkan bahwa berbagai aktor politik lokal memiliki peran yang signifikan dalam implementasi desentralisasi dan Otonomi Khusus di Merauke. Pejabat pemerintah daerah dan DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elit politik yang mendominasi pengambilan keputusan. Sementara itu, tokoh adat berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua, namun masih menghadapi keterbatasan dalam akses politik. Kelompok elit politik memiliki pengaruh besar dalam distribusi sumber daya, yang sering kali tidak merata dan lebih berpihak kepada kepentingan tertentu. Masyarakat adat, sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat utama dari kebijakan Otsus, justru masih mengalami keterbatasan dalam partisipasi politik akibat minimnya akses informasi dan pendidikan politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan transparan agar desentralisasi dan Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Merauke.

Tabel 3 Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

| Aspek | Temuan Penelitian |
|-------------------------------------|---|
| Peluang dalam Otonomi Khusus | Memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk berperan lebih dalam pemerintahan. |
| Tingkat Partisipasi | Masih rendah, terutama di kalangan masyarakat adat. |
| Hambatan Partisipasi | - Kurangnya sosialisasi kebijakan. - Keterbatasan pendidikan politik. - Dominasi elit politik dalam pengambilan keputusan. |
| Dampak terhadap Masyarakat | - Kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat. - Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. - Potensi konflik sosial. |

Makna dari tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun Otonomi Khusus memberikan peluang bagi masyarakat Papua untuk lebih berperan dalam pemerintahan, tingkat partisipasi mereka masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat adat. Hambatan utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi ini antara lain kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan pendidikan politik, serta dominasi elit politik yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat, yang berpotensi memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah guna menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Merauke.

Tabel 4. Tantangan dalam Implementasi Otonomi Khusus di Merauke

| Aspek | Tantangan |
|------------------------------|--|
| Kebijakan | Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan Otsus. Ketimpangan dalam implementasi kebijakan yang tidak selalu berpihak pada masyarakat adat. |
| Tata Kelola Anggaran | Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi dana Otsus. Alokasi dana lebih banyak terserap untuk birokrasi dibandingkan program pembangunan masyarakat. |
| Relasi Sosial-Politik | Konflik kepentingan antara penduduk asli Papua dan kelompok pendatang. Rendahnya partisipasi politik masyarakat adat dalam pemerintahan daerah. |



| | |
|-----------------------|--|
| Layanan Publik | Kualitas layanan publik yang masih belum optimal di beberapa daerah. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedalaman. |
|-----------------------|--|

Tabel di atas menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Otonomi Khusus di Merauke, meliputi aspek kebijakan, tata kelola anggaran, relasi sosial-politik, serta layanan publik. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana Otsus dan rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam pemerintahan menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Selain itu, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan konflik kepentingan antara penduduk asli dan kelompok pendatang turut memperumit pelaksanaan Otsus. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memastikan distribusi manfaat yang lebih merata bagi seluruh warga Merauke.

Pembahasan

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diterapkan di Papua, termasuk di Kabupaten Merauke, telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik lokal. Otsus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan, keuangan, serta kebudayaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat asli Papua. Transformasi ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari struktur kelembagaan pemerintahan, sistem pengambilan keputusan politik, hingga partisipasi masyarakat dalam tata kelola daerah (Kiss et al. 2022).

Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah peningkatan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta keuangan daerah secara lebih mandiri. Dengan adanya Otsus, Merauke mendapatkan alokasi dana khusus yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Selain itu, kebijakan ini juga memungkinkan daerah untuk merancang regulasi sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya local (Rocca and Zielinski 2022), termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Namun, dalam praktiknya, distribusi kewenangan ini tidak selalu berjalan efektif. Meskipun pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar, implementasi kebijakan Otsus masih menghadapi tantangan birokrasi dan kepentingan politik tertentu. Misalnya, dalam penyusunan kebijakan daerah, terdapat dominasi dari aktor-aktor politik tertentu yang lebih berorientasi pada kepentingan elit dibandingkan aspirasi masyarakat luas (Levy 2022). Hal ini berakibat pada kurang optimalnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat asli Papua, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

Selain perubahan dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan Otsus juga memengaruhi dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Seharusnya, Otsus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat, terutama kelompok adat, untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Namun, dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat masih terbatas, baik karena kurangnya sosialisasi kebijakan maupun minimnya akses terhadap informasi pemerintahan (Chitsa et al. 2022). Akibatnya, masyarakat adat sering kali merasa kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.



Dalam konteks demokrasi lokal, Otsus seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan representasi orang asli Papua (OAP) dalam pemerintahan. Beberapa kebijakan afirmatif telah diterapkan, seperti penunjukan perwakilan adat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kebijakan dalam rekrutmen aparatur sipil negara yang mengutamakan OAP (Besley et al. 2022). Namun, implementasi kebijakan ini masih menemui berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya serta ketidakjelasan dalam mekanisme representasi politik masyarakat adat di tingkat lokal.

Selain itu, Otsus juga membawa dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat asli dan kelompok pendatang. Merauke, sebagai salah satu wilayah dengan populasi pendatang yang cukup besar, mengalami ketegangan sosial akibat perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik (Petrova 2021). Dalam beberapa kasus, kelompok pendatang lebih mudah mengakses peluang ekonomi dibandingkan masyarakat asli, yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek pendidikan, modal usaha, dan kesempatan kerja. Ketimpangan ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan menimbulkan konflik kepentingan di tingkat lokal.

Dengan demikian, meskipun kebijakan Otonomi Khusus telah membawa perubahan dalam sistem politik di Merauke, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Agar Otsus benar-benar mampu memperkuat demokrasi lokal, diperlukan penguatan mekanisme tata kelola yang lebih transparan (Petrova 2021), peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta strategi yang lebih efektif dalam memastikan keseimbangan distribusi sumber daya antara masyarakat asli dan kelompok pendatang. Jika tantangan ini dapat diatasi, Otsus dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Merauke.

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, termasuk di Merauke, bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat asli Papua dalam mengelola wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, distribusi kekuasaan dan pengaruh politik masih mengalami berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan kelompok pendatang. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan peran yang berbeda dalam sistem politik lokal, sehingga membentuk pola relasi kekuasaan yang dinamis dan sering kali kompleks (Nilsen, Grillitsch, and Hauge 2023).

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam implementasi Otsus, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta alokasi dana Otsus. Dalam beberapa kasus, kewenangan yang besar ini membuat pemerintah daerah memiliki kendali penuh terhadap penggunaan anggaran, yang tidak selalu diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas (Bronić, Stanić, and Prijaković 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa birokrasi lokal masih menghadapi tantangan dalam mendistribusikan manfaat Otsus secara merata, sehingga masyarakat adat sering kali merasa kurang diakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan, di mana kepentingan politik dan ekonomi sering kali berperan dalam pengambilan keputusan.

Tokoh adat, sebagai representasi masyarakat asli Papua, memiliki posisi penting dalam struktur sosial dan politik di Merauke. Dalam konteks Otsus, mereka diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat



adat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran tokoh adat dalam pemerintahan daerah masih terbatas, terutama dalam aspek perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Dalam beberapa kasus, ada ketegangan antara pemerintah daerah dan tokoh adat terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam (Atisa, Zemrani, and Weiss 2021), di mana pemerintah daerah cenderung lebih mengutamakan investasi dan proyek pembangunan yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat adat.

Sementara itu, kelompok pendatang, yang terdiri dari berbagai etnis dari luar Papua, juga memiliki pengaruh dalam dinamika politik di Merauke. Keberadaan mereka, terutama dalam sektor ekonomi dan pemerintahan, sering kali memunculkan ketegangan dengan masyarakat adat yang merasa terpinggirkan dalam persaingan ekonomi dan politik. Kelompok pendatang, khususnya yang memiliki akses terhadap jaringan ekonomi dan politik nasional, sering kali lebih mudah mendapatkan peluang dalam sektor usaha dan pemerintahan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya (Edwards-Fapohunda 2024). Ketimpangan ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat asli, yang merasa hak-haknya tidak sepenuhnya diakomodasi dalam sistem politik lokal.

Relasi antara ketiga aktor ini—pemerintah daerah, tokoh adat, dan kelompok pendatang—sangat menentukan dinamika politik dan kebijakan di Merauke. Jika tidak dikelola dengan baik, ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya dapat memperburuk ketegangan sosial dan memperlemah efektivitas implementasi Otonomi Khusus. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih inklusif dalam pengambilan kebijakan (Haddad et al. 2022), di mana masyarakat adat benar-benar diberikan ruang yang lebih besar dalam pemerintahan daerah, serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran dan sumber daya. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih dialogis untuk mengatasi ketegangan antara masyarakat adat dan kelompok pendatang, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi dan Otonomi Khusus di Merauke. Secara normatif, Otsus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat, khususnya penduduk asli Papua, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial yang menghambat partisipasi mereka secara optimal (Cornish et al. 2023).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat adalah tingkat pendidikan politik yang masih terbatas. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedalaman, masih memiliki pemahaman yang minim mengenai hak dan kewajiban politik mereka (Hesselman et al. 2021). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan minimnya program sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan maupun bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses tersebut.

Selain pendidikan politik, akses terhadap informasi juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak kebijakan daerah yang dibuat tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan tanpa transparansi informasi yang memadai. Proses pengambilan keputusan cenderung dilakukan secara elitis (Belenguer 2022), di mana hanya kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kebijakan publik. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan media di



beberapa wilayah juga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi terkini mengenai kebijakan yang sedang berjalan. Padahal, partisipasi yang efektif membutuhkan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan dan berbasis data.

Peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga adat dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Beberapa OMS telah berupaya memberikan pendidikan politik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya dominasi aktor-aktor politik tertentu yang berusaha mempertahankan status quo dan membatasi ruang gerak masyarakat dalam pengambilan kebijakan (Brugger and Engebretsen 2022). Di sisi lain, lembaga adat yang seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah terkadang mengalami dilema, terutama ketika kepentingan adat bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah daerah dan dinamika politik nasional juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam politik local (Chu, Bian, and Yang 2022). Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diterapkan tidak sepenuhnya mendukung pemberdayaan masyarakat asli Papua, sehingga mereka merasa termarginalisasi dalam sistem politik yang ada. Selain itu, masih adanya ketimpangan akses antara masyarakat asli dan kelompok pendatang dalam berbagai sektor, termasuk politik, juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.

Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memperluas program pendidikan politik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedalaman. Kedua, transparansi dan keterbukaan informasi harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan dengan mudah. Ketiga, peran OMS dan lembaga adat harus diperkuat sebagai fasilitator dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah (Etokidem et al. 2021). Terakhir, reformasi kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa desentralisasi dan Otonomi Khusus benar-benar memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dapat lebih efektif dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif di Merauke.

Implementasi Otonomi Khusus di Merauke menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memperkuat sistem desentralisasi di tingkat daerah. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah ketimpangan dalam distribusi dana Otsus, di mana alokasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Boakye et al. 2022). Meskipun secara nominal dana yang dialokasikan cukup besar, pemanfaatannya masih sering tidak merata, dengan sebagian besar anggaran lebih banyak terserap untuk administrasi pemerintahan dibandingkan dengan program yang langsung menyentuh masyarakat. Akibatnya, kelompok-kelompok rentan, terutama masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan Otonomi Khusus.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi tantangan serius yang berdampak pada efektivitas kebijakan Otsus. Mekanisme akuntabilitas yang masih lemah sering



kali membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana, yang mengakibatkan kebijakan pembangunan tidak berjalan secara optimal. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa dana Otsus sering kali tidak sampai ke masyarakat sesuai peruntukannya, tetapi justru terserap dalam birokrasi atau dialokasikan untuk kepentingan politik tertentu. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana ini semakin diperburuk dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran (Musiega et al. 2023), sehingga transparansi menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Dari sisi birokrasi, hambatan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah juga menjadi faktor yang menghambat keberhasilan Otsus di Merauke. Kompleksitas sistem birokrasi dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal sering kali menghambat implementasi program yang dirancang untuk mendukung otonomi daerah (Asmorowati, Schubert, and Ningrum 2022). Ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan strategis juga masih cukup kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan di daerah tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam menjalankan program Otsus masih belum optimal, menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek sosial dan politik, ketegangan antara penduduk asli Papua dan kelompok pendatang juga menjadi tantangan dalam implementasi Otsus di Merauke. Pertumbuhan populasi akibat arus migrasi dari daerah lain di Indonesia telah menimbulkan persaingan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam beberapa kasus, masyarakat asli merasa terpinggirkan oleh kelompok pendatang yang lebih memiliki akses terhadap modal dan jaringan ekonomi yang lebih kuat (Arora and Majumder 2021). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan Otsus yang seharusnya memberikan perlindungan lebih bagi hak-hak masyarakat adat terkadang tidak berjalan efektif karena adanya kepentingan politik tertentu yang lebih mengutamakan kelompok-kelompok tertentu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat asli Papua.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Banyak masyarakat, terutama dari kelompok adat, masih merasa tidak memiliki cukup ruang untuk menyuarakan aspirasinya dalam sistem pemerintahan daerah. Hal ini diperburuk dengan masih rendahnya tingkat literasi politik serta kurangnya akses terhadap informasi mengenai kebijakan Otsus dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaannya (Haider and Sundin 2022). Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik elit yang mendominasi pemerintahan daerah.

Dengan berbagai tantangan ini, implementasi Otonomi Khusus di Merauke memerlukan perbaikan sistem yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah (Jung 2022), serta upaya memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk mengelola dinamika sosial antara penduduk asli dan kelompok pendatang agar kebijakan Otsus benar-benar dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat di Merauke.



Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, termasuk di Kabupaten Merauke, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi kewenangan dan alokasi dana khusus bagi pembangunan daerah. Sejak diberlakukan, Otsus telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam peningkatan infrastruktur, layanan publik, serta akses ekonomi bagi masyarakat local (Jung 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam aspek infrastruktur, Otsus telah mendorong pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di berbagai wilayah di Merauke. Peningkatan aksesibilitas ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat, khususnya di daerah pedalaman. Namun, meskipun terjadi kemajuan, masih terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa daerah terpencil masih mengalami kesulitan akses terhadap sarana transportasi dan fasilitas umum (Kaiser and Barstow 2022), yang menghambat distribusi barang dan jasa serta memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam bidang layanan publik, Otsus memungkinkan adanya peningkatan anggaran bagi sektor kesehatan dan pendidikan. Program-program seperti beasiswa bagi pelajar asli Papua serta peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, tantangan utama dalam sektor ini adalah kualitas layanan yang masih belum optimal. Ketersediaan tenaga kesehatan dan guru yang memadai masih menjadi masalah, terutama di daerah pedalaman yang sering kali kekurangan tenaga profesional (Frenk et al. 2022). Selain itu, efektivitas layanan publik juga dipengaruhi oleh faktor birokrasi dan sistem administrasi yang masih perlu diperbaiki agar lebih transparan dan efisien.

Dalam hal kesejahteraan masyarakat, Otsus telah memberikan peluang bagi masyarakat asli Papua untuk lebih terlibat dalam perekonomian lokal. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan bantuan usaha kecil telah membantu meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat (Pradhan et al. 2023). Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketimpangan ekonomi antara masyarakat asli Papua dan kelompok pendatang. Dominasi kelompok pendatang dalam sektor perdagangan dan ekonomi sering kali menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan masyarakat adat, yang merasa kurang mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan peluang bisnis.

Dari perspektif stabilitas sosial, kebijakan Otsus memiliki dampak yang beragam (Helwig and Sinkkonen 2022). Di satu sisi, Otsus diharapkan dapat meredam ketegangan sosial dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, ketimpangan dalam distribusi manfaat Otsus justru berpotensi memperburuk ketegangan sosial, terutama antara masyarakat asli Papua dan kelompok pendatang yang memiliki akses lebih luas terhadap sektor ekonomi dan pemerintahan. Konflik sosial yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan dan implementasi Otsus dapat menghambat stabilitas di daerah dan mengurangi efektivitas program pembangunan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan efektivitas Otsus yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana Otsus harus diperkuat agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana anggaran digunakan untuk



pembangunan. Selain itu, kebijakan afirmatif yang lebih tegas dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua perlu diterapkan, baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, maupun politik, agar mereka dapat lebih berdaya dalam pembangunan daerahnya sendiri. Meningkatkan dialog antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan kelompok masyarakat lainnya juga menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi konflik dan memperkuat stabilitas sosial di Merauke (Christawan et al. 2023).

Dengan pendekatan yang lebih transparan, inklusif (Cooper et al. 2021), dan berkeadilan, kebijakan Otonomi Khusus diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Merauke, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, serta memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat yang ada.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Merauke, diperlukan serangkaian strategi yang berorientasi pada transparansi tata kelola pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat adat, serta desentralisasi yang lebih adil dan inklusif. Kebijakan Otsus seharusnya tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana untuk memberdayakan masyarakat lokal agar lebih aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Awan, Sroufe, and Shahbaz 2021), termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Salah satu strategi utama yang perlu diterapkan adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran Otsus. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana Otsus benar-benar dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat asli Papua. Untuk mencapai hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat melalui audit independen dan partisipatif, di mana masyarakat dapat berperan dalam memantau alokasi dan realisasi anggaran (Augustine 2022). Selain itu, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan forum-forum dialog terbuka secara berkala guna melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Selain transparansi anggaran, pemberdayaan masyarakat adat dalam politik lokal juga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas Otsus. Meskipun Otsus memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan struktural yang membatasi keterlibatan mereka dalam proses politik. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan afirmatif yang lebih konkret (Birhane et al. 2022), seperti peningkatan kuota keterwakilan masyarakat adat dalam lembaga legislatif dan eksekutif daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kepemimpinan politik bagi masyarakat adat melalui program pelatihan, pendidikan politik, serta pemberdayaan organisasi masyarakat adat agar mereka lebih siap dalam memperjuangkan kepentingan komunitasnya.

Strategi selanjutnya adalah memperkuat sistem desentralisasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks Merauke, desentralisasi seharusnya tidak hanya berfokus pada pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan pembangunan. Untuk mewujudkan hal ini, perlu ada kebijakan yang mendorong keseimbangan antara penduduk asli dan kelompok pendatang dalam mengakses layanan publik, peluang ekonomi, serta lapangan pekerjaan. Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis



komunitas (Mahajan et al. 2021), di mana program-program pembangunan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, khususnya komunitas adat.

Selain aspek politik dan ekonomi, stabilitas sosial juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam optimalisasi Otsus. Perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat asli dan pendatang sering kali menjadi sumber ketegangan sosial di Merauke (Alfarabi, Suardi, and Qodir 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan integrasi sosial yang mendorong harmoni antara kelompok-kelompok yang ada. Program-program yang mendorong dialog antarbudaya, kerja sama ekonomi antara masyarakat adat dan pendatang, serta peningkatan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat adat dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kohesi sosial.

Terakhir, keberhasilan Otonomi Khusus di Merauke sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan ini secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu ada evaluasi berkala terhadap implementasi Otsus dengan mengacu pada indikator-indikator keberhasilan yang jelas (Citro et al. 2023), seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta partisipasi politik masyarakat lokal. Pemerintah pusat juga perlu terus memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang adaptif, pendampingan teknis, serta alokasi anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di Merauke.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan kebijakan Otonomi Khusus di Merauke dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan (Kossay 2022). Masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, perlu mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan ini dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, partisipasi politik yang lebih luas, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan budaya mereka. Hanya dengan pendekatan yang transparan, inklusif, dan berbasis keadilan, Otonomi Khusus dapat benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi dan Otonomi Khusus di Kabupaten Merauke telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik lokal, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam efektivitasnya. Meskipun kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan manfaat pembangunan. Partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan politik masih terbatas akibat berbagai faktor, seperti dominasi elit politik, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya pendidikan politik. Selain itu, pengelolaan dana Otonomi Khusus masih menghadapi permasalahan transparansi dan akuntabilitas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Otonomi Khusus di Merauke, diperlukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan peran masyarakat adat dalam proses politik dan pembangunan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan desentralisasi dan Otonomi Khusus dapat benar-benar memberikan manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Merauke.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfarabi, Misran, Wahdania Suardi, and Zuly Qodir. 2021. "Ethnic Identity and Local Politics: Study on Regional Head Election in Merauke Regency 2020." *Journal of Government and Civil Society* 5(2):198–213.
- Arora, Shubhda, and Mrinmoy Majumder. 2021. "Where Is My Home?: Gendered Precarity and the Experience of COVID-19 among Women Migrant Workers from Delhi and National Capital Region, India." *Gender, Work & Organization* 28:307–20.
- Asmorowati, Sulikah, Violeta Schubert, and Ayu Puspita Ningrum. 2022. "Policy Capacity, Local Autonomy, and Human Agency: Tensions in the Intergovernmental Coordination in Indonesia's Social Welfare Response amid the COVID-19 Pandemic." *Journal of Asian Public Policy* 15(2):213–27.
- Atisa, George, Aziza Zemrani, and Mathew Weiss. 2021. "Decentralized Governments: Local Empowerment and Sustainable Development Challenges in Africa." *Environment, Development and Sustainability* 23:3349–67.
- Augustine, ADEKOYA Adesanya. 2022. "Budgeting Techniques and Budgetary Control in Local Governments: Participatory Budgeting a Critical Instrument for Sustainable Development." *International Journal of Management and Economics Invention* 8(11):2682–93.
- Awan, Usama, Robert Sroufe, and Muhammad Shahbaz. 2021. "Industry 4.0 and the Circular Economy: A Literature Review and Recommendations for Future Research." *Business Strategy and the Environment* 30(4):2038–60.
- Belenguer, Lorenzo. 2022. "AI Bias: Exploring Discriminatory Algorithmic Decision-Making Models and the Application of Possible Machine-Centric Solutions Adapted from the Pharmaceutical Industry." *AI and Ethics* 2(4):771–87.
- Besley, Timothy, Robin Burgess, Adnan Khan, and Guo Xu. 2022. "Bureaucracy and Development." *Annual Review of Economics* 14(1):397–424.
- Bhat, Rashid Manzoor, and R. Rajeshwari. 2022. "Diasporic Culture and International Relations- A Historical Study." Pp. 41–46 in *International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology*. Vol. 4.
- Birhane, Abeba, Elayne Ruane, Thomas Laurent, Matthew S. Brown, Johnathan Flowers, Anthony Ventresque, and Christopher L. Dancy. 2022. "The Forgotten Margins of AI Ethics." Pp. 948–58 in *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*.
- Boakye, Jessica, Roberto Guidotti, Paolo Gardoni, and Colleen Murphy. 2022. "The Role of Transportation Infrastructure on the Impact of Natural Hazards on Communities." *Reliability Engineering & System Safety* 219:108184.
- Bronić, Mihaela, Branko Stanić, and Simona Prijaković. 2022. "The Effects of Budget Transparency on the Budget Balances and Expenditures of Croatian Local Governments." *The South East European Journal of Economics and Business* 17(1):111–24.
- Brugger, Fritz, and Rebecca Engebretsen. 2022. "Defenders of the Status Quo: Making Sense of the International Discourse on Transfer Pricing Methodologies." *Review of International Political Economy* 29(1):307–35.
- Chen, Xinxin, John Giles, Yao Yao, Winnie Yip, Qinqin Meng, Lisa Berkman, He Chen, Xi Chen, Jin Feng, and Zhanlian Feng. 2022. "The Path to Healthy Ageing in China: A Peking University–Lancet Commission." *The Lancet* 400(10367):1967–2006.



- Chitsa, Mufaro, Subarna Sivapalan, Balbir Singh Mahinder Singh, and Khai Ern Lee. 2022. "Citizen Participation and Climate Change within an Urban Community Context: Insights for Policy Development for Bottom-up Climate Action Engagement." *Sustainability* 14(6):3701.
- Christawan, E., A. A. B. Perwita, I. W. Midhio, A. Hendra, and H. Risman. 2023. "Journal of Social and Political Sciences." *Journal of Social and Political Sciences* 6(2):98–124.
- Chu, Zhaopeng, Chen Bian, and Jun Yang. 2022. "How Can Public Participation Improve Environmental Governance in China? A Policy Simulation Approach with Multi-Player Evolutionary Game." *Environmental Impact Assessment Review* 95:106782.
- Citro, Constance F., Jonathan Auerbach, Katherine Smith Evans, Erica L. Groshen, J. Steven Landefeld, Jeri Mulrow, Thomas Petska, Steve Pierson, Nancy Potok, and Charles J. Rothwell. 2023. "What Protects the Autonomy of the Federal Statistical Agencies? An Assessment of the Procedures in Place to Protect the Independence and Objectivity of Official US Statistics." *Statistics and Public Policy* 10(1):2188062.
- Cooper, Caren B., Chris L. Hawn, Lincoln R. Larson, Julia K. Parrish, Gillian Bowser, Darlene Cavalier, Robert R. Dunn, Mordechai Haklay, Kaberi Kar Gupta, and Na'Taki Osborne Jelks. 2021. "Inclusion in Citizen Science: The Conundrum of Rebranding." *Science* 372(6549):1386–88.
- Cornish, Flora, Nancy Breton, Ulises Moreno-Tabarez, Jenna Delgado, Mohi Rua, Ama de-Graft Aikins, and Darrin Hodgetts. 2023. "Participatory Action Research." *Nature Reviews Methods Primers* 3(1):34.
- Cornito, Celinmar M. 2021. "Striking a Balance between Centralized and Decentralized Decision Making: A School-Based Management Practice for Optimum Performance." *International Journal on Social and Education Sciences* 3(4):656–69.
- Edwards-Fapohunda, Dr Michael Olumide. 2024. "The Role of Adult Learning and Education in Community Development: A Case Study of New York." *Iconic Research And Engineering Journals* 8(1):437–54.
- Etokidem, Aniekan, Festus Nkpoyen, Comfort Ekanem, Enagu Mpama, and Anastasia Isika. 2021. "Potential Barriers to and Facilitators of Civil Society Organization Engagement in Increasing Immunization Coverage in Odukpani Local Government Area of Cross River State, Nigeria: An Implementation Research." *Health Research Policy and Systems* 19:1–12.
- Figuroa Huencho, Verónica. 2022. "Why Do Indigenous Public Policies Fail?" *Policy Studies* 43(2):125–43.
- Frenk, Julio, Lincoln C. Chen, Latha Chandran, Elizabeth O. H. Groff, Roderick King, Afaf Meleis, and Harvey V Fineberg. 2022. "Challenges and Opportunities for Educating Health Professionals after the COVID-19 Pandemic." *The Lancet* 400(10362):1539–56.
- García Guerrero, Jorge E., Ramón Rueda López, Arturo Luque González, and Nuria Ceular-Villamandos. 2021. "Indigenous Peoples, Exclusion and Precarious Work: Design of Strategies to Address Poverty in Indigenous and Peasant Populations in Ecuador through the SWOT-AHP Methodology." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(2):570.
- Haddad, Carolina R., Valentina Nakić, Anna Bergek, and Hans Hellsmark. 2022. "Transformative Innovation Policy: A Systematic Review." *Environmental Innovation and Societal Transitions* 43:14–40.



- Haider, Jutta, and Olof Sundin. 2022. *Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information*. Taylor & Francis.
- HASSAN, Olufunke Olayemi. 2023. "SOCIAL CONNECTEDNESS AND PSYCHOLOGICAL ADAPTIVENESS AS PREDICTORS OF EMOTIONAL WELLBEING OF THE ELDERLY IN IBADAN, NIGERIA."
- Helwig, Niklas, and Ville Sinkkonen. 2022. "Strategic Autonomy and the EU as a Global Actor: The Evolution, Debate and Theory of a Contested Term." *European Foreign Affairs Review* 27(Special).
- Hesselman, Marlies, Anaïs Varo, Rachel Guyet, and Harriet Thomson. 2021. "Energy Poverty in the COVID-19 Era: Mapping Global Responses in Light of Momentum for the Right to Energy." *Energy Research & Social Science* 81:102246.
- Jung, Sun-Moon. 2022. "Participatory Budgeting and Government Efficiency: Evidence from Municipal Governments in South Korea." *International Review of Administrative Sciences* 88(4):1105–23.
- Kaiser, Noah, and Christina K. Barstow. 2022. "Rural Transportation Infrastructure in Low-and Middle-Income Countries: A Review of Impacts, Implications, and Interventions." *Sustainability* 14(4):2149.
- Khanal, Geha N., Bishal Bharadwaj, Nijan Upadhyay, Tulasi Bhattarai, Minakshi Dahal, and Resham B. Khatri. 2023. "Evaluation of the National Health Insurance Program of Nepal: Are Political Promises Translated into Actions?" *Health Research Policy and Systems* 21(1):7.
- Khoa, Bui Thanh, Bui Phu Hung, and Mohsen Hejsalem-Brahmi. 2023. "Qualitative Research in Social Sciences: Data Collection, Data Analysis and Report Writing." *International Journal of Public Sector Performance Management* 12(1–2):187–209.
- Kiss, Bernadett, Filka Sekulova, Kathrin Hörschelmann, Carl F. Salk, Wakana Takahashi, and Christine Wamsler. 2022. "Citizen Participation in the Governance of Nature-based Solutions." *Environmental Policy and Governance* 32(3):247–72.
- Kossay, Methodius. 2022. "Conceptual Study Of Central Government Policies In Resolving The Papua Conflict In Indonesia (Papua Special Autonomy Perspective)." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 3(3):512–26.
- Lassou, Philippe J. C., Trevor Hopper, and Teerooven Soobaroyen. 2021. "Financial Controls to Control Corruption in an African Country: Insider Experts within an Enabling Environment." *Financial Accountability & Management* 37(2):107–23.
- Lee, Chien-Chiang, and Zhi-Wen He. 2022. "Natural Resources and Green Economic Growth: An Analysis Based on Heterogeneous Growth Paths." *Resources Policy* 79:103006.
- Levy, Brian. 2022. "How Political Contexts Influence Education Systems: Patterns, Constraints, Entry Points." *Synthesis Paper, RISE Programme*.
- Mahajan, Shauna L., Arundhati Jagadish, Louise Glew, Gabby Ahmadia, Hannah Becker, Robert Y. Fidler, Lena Jeha, Morena Mills, Courtney Cox, and Nicole DeMello. 2021. "A Theory-based Framework for Understanding the Establishment, Persistence, and Diffusion of Community-based Conservation." *Conservation Science and Practice* 3(1):e299.
- Musiega, Anita, Benjamin Tsofa, Lizah Nyawira, Rebecca G. Njuguna, Joshua Munywoki, Kara Hanson, Andrew Mulwa, Sassy Molyneux, Isabel Maina, and Charles Normand. 2023. "Examining the Influence of Budget Execution Processes on the Efficiency of County



- Health Systems in Kenya.” *Health Policy and Planning* 38(3):351–62.
- Nilsen, Trond, Markus Grillitsch, and Atle Hauge. 2023. “Varieties of Periphery and Local Agency in Regional Development.” *Regional Studies* 57(4):749–62.
- Palmer, Nicola J., and Nipon Chuamuangphan. 2021. “Governance and Local Participation in Ecotourism: Community-Level Ecotourism Stakeholders in Chiang Rai Province, Thailand.” Pp. 118–35 in *Stakeholders management and ecotourism*. Routledge.
- Parsons, Meg, Lara Taylor, and Roa Crease. 2021. “Indigenous Environmental Justice within Marine Ecosystems: A Systematic Review of the Literature on Indigenous Peoples’ Involvement in Marine Governance and Management.” *Sustainability* 13(8):4217.
- Petrova, Kristina. 2021. “Natural Hazards, Internal Migration and Protests in Bangladesh.” *Journal of Peace Research* 58(1):33–49.
- Prabowo, Purwoko Aji, Bambang Supriyono, Irwan Noor, and M. Khairul Muluk. 2021. “Special Autonomy Policy Evaluation to Improve Community Welfare in Papua Province Indonesia.” *International Journal of Excellence in Government* 2(1):24–40.
- Pradhan, Manas Ranjan, Sayeed Unisa, Ramu Rawat, Somila Surabhi, Abhishek Saraswat, Reshmi RS, and Vani Sethi. 2023. “Women Empowerment through Involvement in Community-Based Health and Nutrition Interventions: Evidence from a Qualitative Study in India.” *Plos One* 18(4):e0284521.
- Rocca, Luz Helena Díaz, and Seweryn Zielinski. 2022. “Community-Based Tourism, Social Capital, and Governance of Post-Conflict Rural Tourism Destinations: The Case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.” *Tourism Management Perspectives* 43:100985.
- Timotheou, Stella, Ourania Miliou, Yiannis Dimitriadis, Sara Villagrà Sobrino, Nikoleta Giannoutsou, Romina Cachia, Alejandra Martínez Monés, and Andri Ioannou. 2023. “Impacts of Digital Technologies on Education and Factors Influencing Schools’ Digital Capacity and Transformation: A Literature Review.” *Education and Information Technologies* 28(6):6695–6726.